



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BUMD BIDANG JASA DAN PRODUKSI**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. KETENTUAN UMUM

- Nama Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
- Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Besar Anggaran : Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- L o k a s i : BUMD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta luar provinsi
- Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan menguatnya pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana-dana bantuan.

Kebijakan anggaran Pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran PAD harus makin meningkat. Dengan subsidi Pusat yang makin berkurang, dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan Daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.

Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham tunggal di 2 BUMD bidang jasa dan produksi (PD Citra Mandiri Jawa Tengah dan PDAB Tirta Utama), pemegang saham mayoritas di 5 BUMD (PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT. Sarana Patra Hulu Cepu, PT. PRPP), dan pemegang saham di BUMN pihak ke 3

(PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma) perlu melakukan pembinaan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang jasa dan produksi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan SDM dan aset-asetnya. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD/BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD/BUMN yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang jasa dan produksi tahun 2020 adalah 8 BUMD/BUMN di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

D. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang jasa dan produksi terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2020 BUMD Bidang Jasa Produksi;
2. Fasilitasi Penyusunan RKAP 2021 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
3. Desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2019 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
4. Rapat Koordinasi Forum sinergi BUMD Bidang Jasa dan Produksi.
5. Koordinasi Konsultasi, dan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi ke pusat dan luar Provinsi.

E. TUJUAN DAN OUTPUT :

1. Evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2020 BUMD Bidang Jasa Produksi;
 - a. Tujuan :
Memantau capaian kinerja BUMD Bidang Jasa dan Produksi sampai dengan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2020.
 - b. Output :
Terpantaunya capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi sampai dengan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2020.
2. Fasilitasi Penyusunan RKAP 2021 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
 - a. Tujuan :
Memantau penyusunan RKAP Tahun 2021 sebelum dimintakan persetujuan oleh RUPS/Pemegang Saham.

- b. Output :
Tersusunnya RKAP Tahun 2021 yang realistis dan optimal.
- 3. Desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2019 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
 - a. Tujuan :
Mendapatkan hasil perhitungan mengenai deviden yang akan disetor atas hasil usaha BUMD/BUMN bidang jasa produksi tahun 2019.
 - b. Output :
Didapatkannya hasil perhitungan deviden atas hasil usaha tahun 2019.
- 4. Rapat Koordinasi Forum sinergi BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
 - a. Tujuan :
Mendapatkan wawasan/pengetahuan mengenai solusi permasalahan dalam peningkatan kinerja dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi.
 - b. Output :
Adanya gambaran yang lebih jelas mengenai solusi permasalahan dalam peningkatan kinerja dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi.
- 5. Koordinasi Konsultasi, dan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Jasa Dan Produksi ke pusat dan luar Provinsi.
 - a. Tujuan :
 - 1) Meningkatkan pengetahuan tentang kinerja dan permasalahan BUMD Provinsi lain.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai target usaha BUMD.
 - 3) Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi BUMD Prov. Jateng.
 - 4) Meningkatkan kinerja BUMD Prov. Jateng.
 - b. Output :
 - 1) Meningkatnya pengetahuan tentang BUMD Provinsi lain.
 - 2) Meningkatnya pengetahuan tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai target usaha BUMD.
 - 3) Adanya solusi atas permasalahan yang dihadapi BUMD Prov. Jateng.
 - 4) Meningkatnya kinerja BUMD Prov. Jateng.

F. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan Koordinasi BUMD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan: Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

G. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Semarang, Mei 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.19660611 198602 1 001